

METODE KLAIFIRIKASI DALAM PENDIDIKAN MORAL

Oleh:

Sudrajat, M. Pd.

*Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS
Universitas Negeri Yogyakarta*

A. Pendahuluan

Pada umumnya pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti, atau apalah namanya, telah mendapat tempat yang cukup baik dalam pendidikan kita. Hal ini dapat dilihat dengan adanya mata pelajaran PKn yang sarat dengan muatan moral terutama moral Pancasila. Mata pelajaran lain yang memiliki nuansa moralitas adalah agama. Bahkan untuk sekolah khusus agama, seperti sekolah Muhammadiyah maupun madrasah, jam pelajaran untuk mata pelajaran agama Islam jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum.

Namun pendidikan moral di sekolah ternyata belum dapat memperbaiki moralitas bangsa yang semakin hari semakin merosot. Budaya hedonisme, perilaku permisif dan serba instan, telah melahirkan generasi yang kurang menghargai moralitas sebagai prinsip yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Krisis kepercayaan yang menghinggapi bangsa Indonesia merupakan kulminasi dari krisis moral bangsa yang telah berkepanjangan. Lantas apa yang salah dengan pengajaran moral? Inilah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Namun berikut ini akan diuraikan pandangan-pandangan tentang pendidikan moral sehingga barangkali dapat sedikit memberikan pencerahan bagi kita semua.

B. Gagasan Tentang Perkembangan Moral

Teori perkembangan moral dapat dilihat dalam tiga paradigma. Pertama, teori *genetik determination* yang memandang bahwa moralitas seseorang ditentukan secara genetik dan dibawa sejak lahir. Kedua, teori *social enforcement* yang menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan menanamkan ideologi dan moralitas seseorang melalui pemaksaan dan indoktrinasi. Ketiga, teori *education and development*, yang memandang bahwa seseorang berkembang penalaran

moralnya melalui lingkungan pendidikan (Lind G, 2002). Lawrence Kohlberg merupakan salah satu tokoh psikologi yang menaruh perhatian terhadap masalah perkembangan moral dalam paradigma yang ketiga.

Lawrence Kohlberg dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1927 di Bronxeille, New York. Pada tahun 1967 ia diangkat sebagai professor dalam bidang psikologi sosial dan ilmu pendidikan. Sejak tahun 1971, Kohlberg berkonsentrasi pada pendidikan moral dengan berbagai penelitian tentang pengajaran moral (John de Santo, 1995: 11-14). Teori perkembangan moral Kohlberg secara formal disebut dengan *the cognitive-developmental theory of moralization* (Reimer, et all., 1983: 43). Pada dasarnya teori perkembangan moral Kohlberg memiliki akar pada karya Jean Piaget, khususnya "*The Moral Judgment of the Child*". Pandangan kognitif-developmental menegaskan bahwa pada intinya moralitas mewakili seperangkat pertimbangan dan putusan rasional yang berlaku untuk setiap kebudayaan yaitu prinsip kesejahteraan manusia dan keadilan (John de Santo, 1995: 66).

Pada dasarnya Kohlberg membagi tahap perkembangan moral dalam enam tahap perkembangan. Keenam tahap perkembangan tersebut dikelompokkan dalam tiga tingkat perkembangan yaitu: prakonvensional, konvensional dan pascakonvensional.

Untuk memahaminya, maka berikut ini akan disajikan urutan tahap-tahap perkembangan moral Kohlberg sebagai berikut (Bertens, 2007: 78-87)

1. *Tingkat prakonvensional*

Tahap 1: orientasi pada kepatuhan dan hukuman

Tahap 2: orientasi relativis instrumental.

2. *Tingkat konvensional*

Tahap 3: penyesuaian dengan kelompok

Tahap 4: orientasi pada hukum dan ketertiban (*law and order*)

3. *Tingkat pascakonvensional*

Tahap 5: orientasi kontrak-sosial legalitas

Tahap 6: orientasi prinsip etika yang universal

Menurut Kohlberg, tahap keenam merupakan tahap yang paling tinggi dan sempurna. Jika kita melihat isi tahap keenam, pasti kita akan menilai tahap tersebut merupakan puncak dari perkembangan moral seseorang. Oleh karenanya, menurut

Kohlberg tahap keenam harus menjadi tujuan pendidikan moral, meskipun pada kenyataannya hanya sedikit orang yang mencapai tahap ini (Bertens, 2007: 87).

C. Pendidikan Moral

Walaupun Kohlberg memulai karier ilmiahnya sebagai peneliti dalam bidang psikologi empiris, namun sejak awal niatnya sudah terpusat dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, Kohlberg (John de Santo, 1995: 33) pernah mengatakan, "dorongan saya untuk menulis sesuatu pertama-tama bersifat pedagogis. ... pendidikanlah yang merupakan praksis pokok, untuknya psikologi menjadi relevan."

Sesuai dengan teori perkembangan moral yang dikemukakannya, pendekatan Kohlberg dalam pendidikan moral disebut pendekatan kognitif-developmental. Asumsi dasar dari pendekatan model tersebut adalah: (1) pendidikan moral memerlukan gagasan filosofis tentang moralitas, (2) perkembangan moral melalui tahap-tahap kualitatif, dan (3) rangsangan terhadap perkembangan moral didasarkan pada rangsangan terhadap pemikiran dan pemecahan masalah (John de Santo, 1995: 65).

Dalam kaitan dengan pendidikan moral, Kohlberg menawarkan metode diskusi ala Socrates yang membahas tentang isu-isu moral (John de Santo, 1995: 66). Dalam metode tersebut guru menawarkan permasalahan moral untuk dibahas oleh siswa melalui metode diskusi. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melihat dan menganalisis permasalahan moral dari perspektif dirinya, kepentingannya, norma dan nilai di masyarakat, dan lain-lain.

Pada akhirnya siswa harus menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh siswa. Apabila Kohlberg menawarkan isu moral fiktif, maka untuk konteks bangsa Indonesia perlu dikemukakan isu-isu moral kontemporer yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah anak memiliki pengalaman yang beranekaragam dalam masalah sosial. Anak juga harus dihadapkan pada permasalahan moral dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian beragamnya permasalahan moral, beragamnya sudut pandang dalam memecahkan masalah moral akan merangsang perkembangan moral anak menuju ke tahap yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut tersebut, barangkali perlu dicatat gagasan Paulo Freire tentang pendidikan hadap masalah. Dalam hal ini Freire berpendapat bahwa pengintegrasian realitas sosial dalam pendidikan merupakan salah satu upaya dalam membebaskan diri dari masalah-masalah. Integrasi biasanya muncul dari kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan realitas, kemudian ditambah dengan kemampuan kritis untuk membuat pilihan dan mengubah realitas (Firdaus M Yunus, 2004: 42).

Nilai-nilai dari kehidupan manusia yang oleh Kohlberg dipercaya sebagai nilai-nilai universal bagi seluruh manusia adalah: hukum dan aturan (*law and rules*), hati nurani (*conscience*), kasih sayang (*personal roles of affection*), kewibawaan (*authority*), keadilan (*civil right*), perjanjian, kepercayaan, dan keadilan (*contract, trust, and justice exchange*), hukuman (*punishment*), nilai-nilai hidup (*the value of life*) hak milik (*property right and values*), dan kebenaran (*truth*) (Reimer, et all, 1983: 84).

Bagi Kohlberg, prinsip yang paling inti bagi perkembangan pertimbangan moral dalam pendidikan adalah keadilan. Keadilan, penghargaan utama terhadap nilai dan persamaan derajat, merupakan tolok ukur yang mendasar dan universal. Penggunaan keadilan sebagai prinsip, menjamin kebebasan dalam berkeyakinan, menggunakan konsep moralitas yang dapat dibenarkan secara filosofis dan didasarkan atas fakta psikologis dari perkembangan manusia (John de Santo, 1995: 67).

D. Kurikulum Pendidikan Moral

Kurikulum pendidikan moral didasarkan pada dimensi moral dari nilai-nilai moralitas kehidupan yang tumbuh dua sumber yaitu bahan pembelajaran serta hubungan antara guru dan siswa (Reimer, et all., 1983: 209). Dalam kaitan dengan interaksi dan hubungan antara guru-siswa, kita mengenal istilah kurikulum tersamar atau *hidden curriculum*.

Pandangan mengenai kurikulum tersamar mendapat pengaruh dari pandangan sosiologi fungsional yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Pandangan ini menegaskan bahwa pengaruh yang tidak kelihatan dari kelangsungan hidup masyarakat menuntut proses terbentuknya lembaga manusia

dan memberikan nilai atau kebijaksanaan yang tidak tampak secara langsung (John de Santo, 1995: 119).

Dalam pandangan tersebut unsur keteladanan merupakan faktor yang sangat penting. Guru harus mampu menghadirkan dirinya sebagai contoh moral dari nilai-nilai moralitas masyarakatnya. Di samping memberikan contoh kongkrit, unsur keteladanan dapat menumbuhkan sebuah atmosfer yang kondusif dalam rangka transformasi moralitas.

Istilah kurikulum tersamar dalam pendidikan moral menunjuk pada suatu kenyataan bahwa sekolah telah terlibat dalam pendidikan moral. Keterlibatan sekolah dalam pendidikan moral tidak secara eksplisit tertuang dalam struktur program pengajaran dan tidak dirumuskan tujuan dan metode yang dipergunakan. Akan tetapi keterlibatan sekolah tampak dalam menciptakan suasana pendidikan yang mendukung bagi tumbuhnya moralitas yang baik bagi siswa-siswanya. Jadi dalam hal ini sekolah berperan sebagai transfer of value khususnya nilai-nilai moralitas yang baik dan luhur. Hal ini akan lebih efektif daripada sekadar indoktrinasi nilai tanpa contoh nyata dari para gurunya.

E. Metode Klarifikasi Nilai

Dalam pandangan Darmiyati Zuchdi pendidikan moral atau nilai dapat disampaikan dengan metode langsung dan tidak langsung (Darmiyati Zuchdi, 2008: 5). Metode klarifikasi nilai sebagai salah satu bentuk dari metode langsung dilakukan dengan klarifikasi nilai oleh guru. Dalam hal ini guru memberikan jawaban atas nilai-nilai dan moral yang seharusnya dipercaya oleh siswa. Metode ini sering dipandang sebagai penanaman moral atau moralisasi yang dikritisi sebagai bentuk indoktrinasi dan bertolakbelakang dengan kebutuhan pendidikan untuk demokratisasi warga negara.

Metode ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa guru merupakan suatu alat dalam rangka transformasi nilai. Lebih jauh Reimer dan kawan-kawan (1983: 8) menyatakan:

... indeed, arguing for value neutrality is itself a value position. Teacher by their pedagogically choices and their modeling behavior, are of necessity moral educators, regardless of the subject matter by teach. Thus, when question raised,

“Should school engage in values and moral education?” we have no choice but to answer that schools are necessarily institutions of significant moral enterprise.

Pendidikan yang produktif dan efektif tentu saja tetap harus memperhatikan dimensi kognitif, afektif, dan aksional. Dimensi kognitif berkaitan dengan pemahaman rasional dan kemampuan "memilah serta memilih" nilai-nilai yang melingkungi kehidupan sehari-hari. Dimensi afektif berkenaan dengan kecocokan rasa serta hati. Adapun dimensi aksional berhubungan dengan tindakan konkret yang merupakan pengejawantahan atas pemahaman serta kecocokan suatu nilai yang telah dipilih oleh para siswa itu sendiri (Pungky Setiawan, 2001).

Menurut pendapat Harmin, Rath, dan Simon metode klarifikasi nilai dapat dijalankan dengan tujuh langkah yaitu (Dalam Reimer, et all., 1983: 9):

Menilai kepercayaan dan tingkah laku seseorang

1. Memilah dan memilih nilai
2. Menegaskan nilai secara umum

Memilih kepercayaan dan tingkah laku

3. Mempertimbangkan nilai yang akan diambil dari berbagai alternatif
4. Memilih setelah mempertimbangan akibat yang ditanggung
5. Memilih secara bebas

Bertindak atas kepercayaan itu

6. Bertindak
7. Bertindak dengan sebuah pola, konsisten dan pengulangan

Hal yang perlu ditekankan dalam klarifikasi nilai adalah sikap siswa dalam menentukan pilihan dari dilema nilai dan moral. Hal ini merupakan sebuah refleksi dari pertanyaan-pertanyaan tentang prinsip dasar, kriteria, atau standar dimana kita menentukan apakah secara moral dapat dilakukan, apakah secara moral benar atau salah dan apakah moral kita sudah benar (Reimer, et all., 1983: 10). Dengan demikian, maka siswa akan mempunyai kebebasan dalam memilih nilai dan moralitas macam apa yang akan diambil dan dikerjakan. Harapannya, nilai dan moralitas yang dipilih berkembang menjadi kebiasaan (habit) yang akhirnya terpola menjadi suatu budaya. Dengan demikian pendidikan moral melalui

klarifikasi nilai diharapkan dapat menyemaikan kultur yang berakar pada nilai-nilai dan moralitas luhur dan berbudi.

Tugas utama guru dalam metode klarifikasi nilai adalah membimbing dan memandu siswa dalam menentukan pilihan moralitas. Dengan demikian guru harus memberikan pandangan-pandangan secara luas terhadap moralitas apa yang akan dipilih oleh siswa. Guru harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa tentang akibat dari nilai yang dipilihnya. Guru juga harus dapat menjelaskan perspektif budaya-budaya dan moralitas yang berkaitan dengan masalah moralitas yang sedang dihadapi oleh siswa. Namun meskipun demikian, penentuan pilihan nilai sepenuhnya berada di tangan siswa.

E. Penutup

Dekadensi moral yang terus menerus menghantui bangsa ini harus segera dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Krisis kepercayaan bangsa ini lahir karena lemahnya moralitas kolektif masyarakat. Globalisasi dengan segala dampaknya, akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian bangsa. Untuk itulah rasanya pendidikan moral merupakan langkah strategis untuk alternatif pemecahan masalah moral bangsa.

Pendidikan moral merupakan salah satu aspek yang menarik perhatian Lawrence Kohlberg. Dengan teori *the cognitive-developmental of moralization*, Kohlberg menetapkan bahwa tujuan pendidikan moral adalah pencapaian orientasi etika universal, dimana dalam tahap ini seseorang dapat memahami, menerima dan melaksanakan aturan berdasarkan hati nuraninya. Bahkan sangat dimungkinkan siswa mengkritisi aturan yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, demokrasi, dan prinsip-prinsip lainnya.

Pendidikan moral menurut Kohlberg tidak perlu dimasukkan dalam struktur kurikulum. Kohlberg menyebut dengan istilah *hidden curriculum* untuk menunjuk pada kurikulum yang tersamar dimana pembelajaran tercipta melalui komunikasi, diskusi, dan hubungan antara murid-guru. Dalam kaitan dengan hal tersebut Kohlberg ingin menekankan adanya tauladan dari guru kepada siswa-siswanya. Melalui tauladan guru itulah siswa dapat mengidentifikasi nilai dan moralitas yang baik dan sesuai dengan karakter masyarakat dan bangsanya.

Metode pendidikan moral dapat dilakukan dengan model diskusi Sokratik maupun klarifikasi nilai. Lewat model diskusi guru perlu menciptakan dilema moral yang kemudian dipecahkan oleh siswa melalui diskusi dan dialog. Dengan seringnya siswa menghadapi dilema moral diharapkan siswa terbiasa dengan permasalahan moral dan dapat memecahkannya dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

Bertens, K. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius.

Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia.

Darmiyati Zuchdi. 2008. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Firdaus M Yunus. 2004. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire dan YB Mangunwijaya*. Yogyakarta: Logung Press.

John de Santo & Agus Cremers (ed). 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

Kompas, Edisi 12 Desember 2000.

Lind, G. 2002. "Can Morality be Taught?" tersedia dalam www.uni-konstanz.de/ag-moral/ diakses tanggal 20 April 2009.

Magnis Suseno, Franz. 1998. *13 Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

Pungky Setiawan. 2001. "Metode Klarifikasi Nilai Dalam Pendidikan Budi Pekerti". *Kompas Edisi Senin 22 Januari 2009*.

Reimer, J., Paolitto, DP., Hersh, Richard H. 1983. *Promoting Moral Growth: From Piaget to Kohlberg*. New York: Longman Inc.